



BPK RI

Awasi APBN Online dan Real Time

JAKARTA - Upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terus dilakukan. Kali ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan sistem pengawasan layaknya *closed circuit television* (CCTV).

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, istilah CCTV merujuk pada sistem pengawasan *online* dan *real time* untuk mengetahui seluruh gerak-gerik atau lalu lintas transaksi keuangan negara. "Bentuknya adalah pusat data," ujarnya kemarin (14/3).

Menurut Hadi, pengawasan secara *online* dan *real time* dimungkinkan karena sistem yang dikembangkan BPK tersebut akan dijalankan dengan basis pemeriksaan secara elektronik atau e-audit. "Sistem ini memungkinkan BPK melakukan monitoring secara ketat, efektif, dan efisien," katanya.

Hadi menyatakan, BPK memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran di pusat, daerah, maupun badan usaha milik negara (BUMN). Karena itu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hingga belanja modal

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

Awasi APBN Online dan Real Time

Sambungan dari halaman 1

(*capital expenditure*) dan belanja operasional (*operational expenditure*) BUMN akan masuk sistem pengawasan ini.

Bagaimana mekanisme pengawasannya? Hadi mengatakan, untuk APBN, BPK akan mengakses data lalu lintas anggaran melalui 177 kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). Lalu, untuk APBD, BPK akan mengakses data dari 26 bank pembangunan daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Adapun untuk belanja BUMN, BPK akan mengakses melalui transaksi di bank-bank BUMN. (*owi/c10/kim*)